

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020

M Ferdinan Agung Pratama
NPP. 30.0388
Asdaf Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
Prodi Politik Indonesia Terapan
Email: 30.0388@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Ani Martini, S.STP., M.Si.

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): West Bangka Regency has increased the political participation of the people of West Bangka Regency in the 2020 Regional Elections which has not yet reached the target even though there is an increase in the 2020 Regional Elections compared to the 2015 Regional Elections so that future political participation of the community can reach the target. **Purpose:** Know and Analyze Community Political Participation by KPU in PILKADA in West Bangka Regency. Knowing and analyzing the inhibiting factors that arise from the political participation of the community in the regional elections in West Bangka Regency. **Method:** In writing this thesis using qualitative methods to explore and obtain information in the form of necessary data. The technique used in this research is using purposive sampling techniques that can be used to obtain information or data and informants. In the purposive sampling method, informants are considered as sources who know the problem under study. In addition, researchers use the snowball sampling method so that data is obtained more objectively, completely, and precisely through the determination of informants. **Results:** The results of the study show that in this case the KPU of West Bangka Regency still finds obstacles that occur in providing political education to the community in West Bangka Regency so that in the future the KPU will continue to work with other parties to increase community political participation in West Bangka Regency. **Conclusion:** The General Election Commission of West Bangka Regency has the task of increasing public political participation in West Bangka Regency where in the Regional Elections the target of community participation in West Bangka Regency has not been achieved, which can be seen from the functions and duties of the West Bangka Regency Regional Election Commission as stated in PKPU regulation No. 23 of 2013 concerning community participation in the implementation of elections. The Regional Election Commission of West Bangka Regency has an important role in improving and providing education for community participation, especially in the West Bangka Regency area.

Keywords: Participation, Improvement, Political Education

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Bangka Barat melakukan peningkatan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bangka Barat dalam PILKADA 2020 yang masih belum mencapai target walaupun ada peningkatan di PILKADA 2020 dibandingkan PILKADA 2015 sehingga partisipasi politik masyarakat kedepannya bisa mencapai target. **Tujuan:** Mengetahui dan Menganalisis Partisipasi Politik Masyarakat oleh KPU dalam PILKADA di Kabupaten Bangka Barat. Mengetahui dan Menganalisis faktor penghambat yang muncul dari partisipasi politik masyarakat dalam PILKADA di Kabupaten Bangka Barat. **Metode:** Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berbentuk data yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau data dan informan. Dalam metode purposive sampling informan dianggap sebagai narasumber yang mengetahui masalah yang diteliti. Selain itu juga, peneliti menggunakan metode snowball sampling agar data diperoleh lebih objektif, lengkap dan tepat melalui penentuan informan. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dalam hal ini pihak KPU Kabupaten Bangka Barat masih menemukan hambatan-hambatan yang terjadi dalam memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Bangka Barat sehingga kedepannya KPU akan terus bekerja sama dengan pihak lainnya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bangka Barat. **Kesimpulan:** Komisi pemilihan umum kabupaten bangka barat memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di kabupaten bangka barat dimana dalam Pilkada yang masih belum tercapainya target partisipasi masyarakat di kabupaten bangka barat, yang dapat dilihat dari fungsi dan tugas komisi pemilihan umum daerah kabupaten bangka barat yang tertuang dalam peraturan PKPU No. 23 Tahun 2013 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Komisi pemilihan umum daerah kabupaten bangka barat memiliki peran penting dalam meningkatkan dan memberikan Pendidikan terhadap partisipasi masyarakat yang terkhususnya di daerah kabupaten bangka barat.

Kata Kunci : Partisipasi, Peningkatan, Pendidikan Politik

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, tentunya pemilihan umum (pemilu) harus berada pada tahapan administrasi negara. Pemilu dianggap sangat penting karena merupakan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi yang menentukan kedudukan wakil rakyat dalam badan perwakilan rakyat, dan sekaligus memilih presiden dan wakil presiden. penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan dengan integritas yang tinggi. Rakyat memilih wakil-wakil yang memiliki kekuasaan untuk membuat produk hukum dan mengawasi atau menegakkan kehendak rakyat sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, wakil-wakil tersebut dan untuk melayani masyarakatnya mencapai kesejahteraan.

Salah satu Bentuk partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada dapat dilihat dari keterlibatan langsung masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Partisipasi politik dalam pemilihan umum atau diistilahkan dengan jumlah pemilih telah menjadi kekhawatiran banyak ilmuwan politik dan pemegang kekuasaan kepemiluan. Selain itu pemilu yang berkualitas juga dievaluasi dari aspek bagaimana budaya politik masyarakat, apakah sekedar ikutan dimobilisasi elite, sekedar ikut pemilu karena ancaman aparat seperti era orde baru atau sebaliknya ikut pemilu dikarenakan ingin perubahan atau ingin memberi reward bagi pemimpin politik yang dianggap telah berhasil.

Tahun 2020 Indonesia melaksanakan Pilkada serentak di Provinsi Kabupaten dan Kota sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Salah satu Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020 adalah Kabupaten Bangka Barat. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan legalitas penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, dalam hal ini terdapat hal penting dalam penyelenggaraan Pilkada seperti partisipasi masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat dalam rangka mensosialisasikan Pilkada melakukan pelayanan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dengan berbagai cara. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi jelas terkait dengan Pilkada yang bertujuan untuk mengajak pemilih sukarela datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dengan mendatangi langsung rumah-

rumah warga di pelosok dan kegiatan Betason (kegiatan diskusi terbuka) dengan mengundang kelompok warga dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 sebesar 66,4% dengan angka golput sebanyak 33,6%.⁶ Sedangkan partisipasi politik masyarakat Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 74,2% dengan angka golput sebanyak 25,8%. Peningkatan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2020 masih belum mampu mencapai target 77% yang ditetapkan KPUD Kabupaten Bangka Barat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat sejak awal sebelum Pilkada Tahun 2020 telah melakukan upaya untuk mendongkrak tingkat partisipasi pemilih, namun hasilnya partisipasi masyarakat masih belum mencapai target dan angka golput masih cukup tinggi. KPUD melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa, Dinas komunikasi dan Informatika, dan kantor camat, secara bersama-sama melakukan sosialisasi dan menguatkan masyarakat untuk melaksanakan hak pilih. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat juga sudah memasang banyak spanduk dan balinho berisi ajakan memilih di lokasi-lokasi strategis dan ditambah dengan pengumuman melalui portal resmi yang dikelola Diskominfo.

Bedasarkan permasalahan yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020”**

1.2 Kesenjangan Masalah

Partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 sebesar 66,4% dengan angka golput sebanyak 33,6%.⁶ Sedangkan partisipasi politik masyarakat Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 74,2% dengan angka golput sebanyak 25,8%. Peningkatan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2020 masih belum mampu mencapai target 77% yang ditetapkan KPUD Kabupaten Bangka Barat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penanggulangan bencana sebagai berikut.

Pertama, Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Primandha Sukma Nur Wardhan, 2018, Jurnal) dengan hasil Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Suatu kategori kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh adalah pemilih pemula. Pemilih Pemula adalah pemilih-pemilih yang baru pertama kali akan memberikan suaranya dalam Pemilu(Wardhan, 2018).

Kedua, Partisipasi Politik Pemilih pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial (Loina Lalolo Krina Perangin-angin dan Munawaroh Zainal, 2018, Jurnal) dengan hasil partisipasi politik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data penelitian dikumpulkan melalui diskusi terarah dan wawancara mendalam kepada 63 orang mahasiswa yang terpilih secara purposif di 3 kota besar; Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan media sosial telah digunakan secara massif oleh para pemilih pemula karena melalui media sosial mereka dapat berinteraksi dan berkomunikasi tanpa memerlukan persiapan fisik maupun keharusan untuk memperlihatkan atribut kepribadian secara terbuka(Perangin-angin & Zainal, 2018).

Ketiga, Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik Sebuah Kajian Teori Kajian Teoritis (Widiyaningrum, Widdy Yuspita, 2020, Jurnal) dengan hasil Keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia tidak pernah melebihi angka 20%. Jauh dari harapan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu langkah affirmative action untuk

meningkatkan partisipasi politik perempuan dan cara khusus untuk mencapai kesetaraan gender dalam berpolitik. Artinya, dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang politik(Widiyaningrum & Yuspita, 2020).

Kempat, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018(Sa'ban, L. A., Sadat, A., & Nastia, 2019, Jurnal) Data dikumpulkan dengan analisis dokumen, pengamatan wawancara, dan dianalisis dengan tehnik deskriptif kualitatif dan Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah:Tingkat partisipasi masyarakat di Kota BauBau tergolong tinggi dikarenakan jika diakumulasikan sebesar 69,87%(Sa'ban et al., 2019) .

Kelima, Partisipasi Politik Masyarakat Desa Rias pada Pemilu 2019(Amin, K., Ikramatoun, S., & Halik, 2021, Jurnal) Studi ini menemukan bahwa jumlah pemilih di Desa Rias lebih tinggi dari rata-rata jumlah pemilih di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. partisipasi tersebut berkorelasi positif dengan partisipasi politik di tingkat kecamatan hingga nasional. Kondisi yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat Desa Rias pada pemilu 2019 adalah dinamika politik pilpres, caleg dari dalam Desa Rias, pengalaman, dan pengetahuan politik masyarakat(Amin et al., 2021).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, perbedaan penelitian akan penulis deskripsikan sebagai berikut

Pertama, Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Primandha Sukma Nur Wardhan, 2018, Jurnal) perbedaan: Dimana dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dimana berbeda dengan metode yang dipakai penulis.

Kedua, Partisipasi Politik Pemilih pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial (Loina Lalolo Krina Perangin-angin dan Munawaroh Zainal, 2018, Jurnal) Perbedaan : Penelitian ini meneliti tentang partisipasi dalam media sosial dimana data dikumpulkan melalui diskusi.

Ketiga, Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik Sebuah Kajian Teori Kajian Teoritis (Widiyaningrum, Widdy Yuspita, 2020, Jurnal) perbedaannya: Dalam penelitian ini mengambil kasus tentang partisipasi keterwakilan perempuan.

Kempat, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018(Sa'ban, L. A., Sadat, A., & Nastia, 2019, Jurnal) Perbedaan : Dalam penelitian ini tingkat partisipasi masyarakatnya yang tinggi.

Kelima, Partisipasi Politik Masyarakat Desa Rias pada Pemilu 2019(Amin, K., Ikramatoun, S., & Halik, 2021, Jurnal) Perbedaan : Penelitian ini lebih berkaitan dengan kontes sosial politik.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan guna Mengetahui dan Menganalisis Partisipasi Politik Masyarakat oleh KPU dalam PILKADA di Kabupaten Bangka Barat. Mengetahui dan Menganalisis faktor penghambat yang muncul dari partisipasi politik masyarakat dalam PILKADA di Kabupaten Bangka Barat.

II. METODE

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif yaitu dengan cara mempelajari, mengamati, memahami, dan menggali permasalahan yang terjadi dilokasi kegiatan penelitian kemudian menganalisis dan membandingkan dengan teori maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan Teori Partisipasi Politik Menurut Dan Nimmo.

Informan pada penelitian ini terdapat 8 informan. peneliti menggunakan metode purposive sampling yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau data dan informan(Sugiyono, 2013). Sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer(sugiyono, 2018). Penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang akan dilakukan oleh praja menggunakan instrumen sederhana dalam wawancara, observasi, dan catatan lapangan(sugiyono, 2018). Teknik Analisis Data proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentai, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain(Sugiyono, 2013).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Partisipasi Politik Masyarakat dalam PILKADA di Kabupaten Bangka Barat.

Penulis melakukan penelitian ini tentang partisipasi politik masyarakat yang dilakukan oleh KPU dalam pelaksanaan PILKADA di Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan teori Nimmo (2000:47), dimana terdapat 3 dimensi diantaranya yaitu peluang resmi, sumber daya sosial dan motivasi personal.

a. Peluang Resmi

Peluang resmi dimaksudkan dalam hal ini yaitu peluang masyarakat terhadap politik yang ikut berpartisipasi terhadap pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, diharapkan dapat memperbesar peluang masyarakat untuk ikut berpolitik.

i. Peluang Masyarakat Terhadap Politik

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat telah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bangka Barat dengan melakukan berbagai cara salah satunya dengan Pendidikan politik terhadap masyarakat di kabupaten bangka barat, dengan adanya Pendidikan politik terhadap masyarakat maka akan terbuka peluang yang lebih besar terhadap masyarakat untuk berpartisipasi politik. Dalam peraturan PKPU No 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat, telah dijelaskan bahwa Pendidikan politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang telah penulis lakukan salah satunya dengan anggota KPU Kabupaten Bangka Barat yaitu bapak yulizar di divisi sosialisasi, Pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, dimana dalam wawancara tersebut disampaikan bahwa KPU sendiri telah melakukan Pendidikan politik terhadap masyarakat dengan sosialisasi ke desa-desa yang masih minim terhadap politik. Pihak KPU sendiri melakukan dengan target masyarakat yang sedang berkumpul seperti acara yang diadakan di desa-desa. Dimana pihak KPU yang telah bekerja sama dengan pihak desa melakukan rencana untuk melakukan sosialisasi tepat saat banyak masyarakat yang berkumpul di acara desa tersebut, sehingga pihak KPU tidak perlu lagi melakukan sosialisasi ke rumah rumah masyarakat satu per satu.

ii. Pemanfaatan Teknologi Yang Maksimal

Penulis dalam hal ini telah mewawancarai dari pihak KPU yaitu Bapak Yulizar, SE,MM sebagai anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM selaku perwakilan dari pihak KPU:

Pihak KPU sendiri telah melakukan promosi maupun sosialisasi dan pemberian informasi dengan membuat sosial media maupun 65 website sehingga masyarakat yang dalam hal ini kaum milenial lebih mudah mengakses dan mendapatkan informasi tentang KPU maupun PILKADA terkini dan bisa menarik minat kaum milenial untuk berpartisipasi politik

Penulis juga mewawancarai Bapak Daniar selaku masyarakat yang dalam hal ini merupakan kaum milenial yang biasanya bermain sosial media:

menurut saya dengan adanya website dari KPU dapat lebih memudahkan saya maupun orang lain dalam mencari informasi sehingga masyarakat yang tidak tau apa-apa bisa sedikit mengetahui informasi yang ada, apalagi dengan adanya sosial media yang dibuat oleh KPU dapat lebih memudahkan orang-orang untuk mengaksesnya.

b. Sumber Daya Sosial

Dalam melihat sumber daya sosial yang ada pihak KPU telah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti desa, partai politik maupun organisasi yang terkait untuk melakukan Pendidikan politik terhadap masyarakat, dimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, dalam Pasal 2 yang berisikan pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bertujuan untuk: memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik; dan memberikan kemudahan bagi partai politik, partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik di daerah.

i. Koneksi Di Lingkungan Masyarakat

Masyarakat telah banyak menerima informasi mengenai Pendidikan politik dari KPU maupun partai politik. termasuk dari partai PKS sendiri dimana partai tersebut telah melakukan program Pendidikan politik berupa sosialisasi yang ditargetkan ke desa desa yang kurang partisipasi politiknya sehingga dapat membantu KPU untuk meningkatkan partisipasi politik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk pentingnya ikut dalam perpolitikan, sehingga masyarakat sedikit demi sedikit dapat tertarik dalam partisipasi politik yang telah diprogramkan oleh partai politik.

ii. Tingkat Kolaborasi Dari Organisasi Dan Masyarakat

Kordinasi diantara pihak-pihak yang terkait seperti dari pihak partai politik yang telah membantu KPU dalam melakukan Pendidikan politik untuk masyarakat yang berada di desa-desa sehingga dapat membantu pendektan terhadap masyarakat yang kurang peduli terhadap partisipasi politik. tetapi di sisi lain masyarakat juga masih kurang memperdulikan dimana masih banyaknya masyarakat yang kurang tertarik Ketika adanya sosialisasi politik. Selanjutnya dari pihak KESBANGPOL sendiri sering juga ikut dalam kegiatan pendidikan politik yang biasanya diselenggarakan oleh KPU dan partai politik, dalam kegiatan tersebut pihak KESBANGPOL menjadi pengawas dalam kegiatan tersebut.

c. Motivasi Personal

Masyarakat yang terlibat dalam partisipasi politik masyarakat harus memiliki motivasi, dimana motivasi sangat penting sehingga masyarakat dapat tertarik dalam berpartisipasi politik khususnya dalam PILKADA, motivasi sendiri wajib dimiliki oleh setiap masyarakat dikarenakan Ketika masyarakat tidak memiliki motivasi untuk berpolitik maka akan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap politik.

i. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemimpin Daerah

Kepercayaan masyarakat saat ini masih kurang terhadap kepala daerah dimana kontribusi kepala daerah masih kurang terhadap masyarakat sehingga masyarakat beranggapan pemimpin daerah yang mereka pilih sama aja dengan pemimpin daerah sebelumnya, jadi masyarakat yang ikut berpartisipasi maupun yang tidak berpikiran bahwa berpartisipasi politik itu tidak terlalu penting sehingga masyarakat lebih mementingkan kegiatan yang lain.

ii. Kepedulian Masyarakat Terhadap Pentingnya Partisipasi Politik Masyarakat

Masyarakat yang tidak bisa ikut berpartisipasi politik dalam PILKADA dari pihak politik sendiri telah bertanggung jawab untuk memaksimalkan hak pilih masyarakat dengan mendatangkan kerumah-rumah masyarakat yang berhalangan hadir sehingga masyarakat bisa memberikan hak suara pada PILKADA dan ikut berpartisipasi walaupun dirumah.

3.2 Faktor Penghambat Yang Muncul Dari Partisipasi Politik Masyarakat Dalam PILKADA Di Kabupaten Bangka Barat

Banyaknya hambatan yang ditemukan oleh pihak KPU Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan Pendidikan politik kepada masyarakat terkhususnya masyarakat di desa-desa terpencil, dimana kurang layaknya jalur untuk menuju ke desa-desa tersebut hingga masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap Pendidikan politik yang diberikan KPU Kabupaten Bangka Barat dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

1. Hambatan dari Pihak Terkait, hambatan yang diterima oleh pihak terkait yaitu dari KPU kabupaten Bangka Barat yaitu jarak desa-desa yang terlalu jauh dan juga jalan yang sulit dilalui oleh pihak KPU untuk melakukan Pendidikan politik ditambah lagi terbatasnya anggaran yang diterima oleh KPU untuk melakukan Pendidikan politik sehingga tidak maksimalnya kegiatan tersebut dan akibatnya masih banyak masyarakat yang belum tersampaikan.
2. Unsur Masyarakat, hambatan yang terjadi pada pihak masyarakat sendiri muncul dari ketidakpercayaan lagi masyarakat terhadap kepala daerah yang terpilih dikarenakan janji-janji maupun program yang dijanjikan tidak terlaksana akibatnya faktor ekonomi menjadi dampak partisipasi politik kurang diminati oleh masyarakat dan masyarakat berpikir mau siapapun yang terpilih pasti ekonomi masyarakat akan sama saja jadi masyarakat lebih memilih untuk bekerja dan memilih kegiatan yang lebih pasti.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebaharuan Penelitian yang penulis laksanakan pada penelitian sebelumnya akan penulis deskripsikan sebagai berikut.

Pertama, Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Primandha Sukma Nur Wardhan, 2018, Jurnal) Kebaharuan penelitian terletak pada Dalam melihat sumber daya sosial yang ada pihak KPU telah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti desa, partai politik maupun organisasi yang terkait untuk melakukan Pendidikan politik terhadap masyarakat, dimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik, dalam Pasal 2 yang berisikan pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bertujuan untuk: memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik; dan memberikan kemudahan bagi partai politik, partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik di daerah

Kedua, Partisipasi Politik Pemilih pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial (Loina Lalolo Krina Perangin-angin dan Munawaroh Zainal, 2018, Jurnal) Kebaharuan

penelitian terletak Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat telah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bangka Barat dengan melakukan berbagai cara salah satunya dengan Pendidikan politik terhadap masyarakat di kabupaten bangka barat, dengan adanya Pendidikan politik terhadap masyarakat maka akan terbuka peluang yang lebih besar terhadap masyarakat untuk berpartisipasi politik.

Ketiga, Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik Sebuah Kajian Teori Kajian Teoritis (Widiyaningrum, Widdy Yuspita, 2020, Jurnal) Kebaharuan penelitian terletak pada Kordinasi diantara pihak-pihak yang terkait seperti dari pihak partai politik yang telah membantu KPU dalam melakukan Pendidikan politik untuk masyarakat yang berada di desa-desa sehingga dapat membantu pendektan terhadap masyarakat yang kurang peduli terhadap partisipasi politik. tetapi di sisi lain masyarakat juga masih kurang memperdulikan dimana masih banyaknya masyarakat yang kurang tertarik Ketika adanya sosialisasi politik. Selanjutnya dari pihak KESBANGPOL sendiri sering juga ikut dalam kegiatan pendidikan politik yang biasanya diselenggarakan oleh KPU dan partai politik, dalam kegiatan tersebut pihak KESBANGPOL menjadi pengawas dalam kegiatan tersebut

Kempat, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018 (Sa'ban, L. A., Sadat, A., & Nastia, 2019, Jurnal) Kebaharuan penelitian terletak pada Kepercayaan masyarakat saat ini masih kurang terhadap kepala daerah dimana kontribusi kepala daerah masih kurang terhadap masyarakat sehingga masyarakat beranggapan pemimpin daerah yang mereka pilih sama aja dengan pemimpin daerah sebelumnya, jadi masyarakat yang ikut berpartisipasi maupun yang tidak berpikiran bahwa berpartisipasi politik itu tidak terlalu penting sehingga masyarakat lebih mementingkan kegiatan yang lain.

Kelima, Partisipasi Politik Masyarakat Desa Rias pada Pemilu 2019 (Amin, K., Ikramatoun, S., & Halik, 2021, Jurnal) Kebaharuan penelitian terletak pada Komisi pemilihan umum kabupaten bangka barat memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di kabupaten bangka barat dimana dalam pilkada yang masih belum tercapainya target partisipasi masyarakat di kabupaten bangka barat, yang dapat dilihat dari fungsi dan tugas komisi pemilihan umum daerah kabupaten bangka barat yang tertuang dalam peraturan PKPU No 23 Tahun 2013 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Komisi pemilihan umum daerah kabupaten bangka barat memiliki peran penting dalam meningkatkan dan memberikan Pendidikan terhadap partisipasi masyarakat yang terkhususnya di daerah kabupaten bangka barat.

IV. KESIMPULAN

Penulis bedasarkan penelitian mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah kabupaten bangka barat tahun 2020, bahwa dapat disimpulkan

1. Komisi pemilihan umum kabupaten bangka barat memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di kabupaten bangka barat dimana dalam Pilkada yang masih belum tercapainya target partisipasi masyarakat di kabupaten bangka barat, yang dapat dilihat dari fungsi dan tugas komisi pemilihan umum daerah kabupaten bangka barat yang tertuang dalam peraturan PKPU No. 23 Tahun 2013 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Komisi pemilihan umum daerah kabupaten bangka barat memiliki peran penting dalam meningkatkan dan memberikan Pendidikan terhadap partisipasi masyarakat yang terkhususnya di daerah kabupaten bangka barat
2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh komisi pemilihan umum kabupaten bangka barat dalam melaksanakan peningkatan partisipasi politik terhadap masyarakat di kabupaten bangka barat dapat dibagi menjadi 2 faktor yaitu, faktor internal dan eksternal

- a. Hambatan internal yaitu antara lain :
 1. Masih terbatasnya anggaran yang membuat pihak KPU memutar otak untuk memaksimalkan anggaran yang ada.
- b. Hambatan eksternal yaitu antara lain :
 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi politik sehingga ini merupakan pekerjaan keras untuk KPU Kabupaten Bangka Barat untuk mengatasi hal tersebut.
 2. Masih banyaknya desa-desa yang belum terjangkau dikarenakan akses yang sulit dan terbatas.
 3. Banyak masyarakat yang lebih mementingkan kegiatan lain daripada ikut berpartisipasi dalam PILKADA.
 4. Masih sangat minimnya kepercayaan masyarakat kepada kepala daerah, akibatnya pada PILKADA masyarakat banyak yang berpikiran kepala daerah yang terpilih nanti akan sama dengan kepala daerah sebelumnya..

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang meneruskan penelitian ini agar dapat memaksimalkan hasil dari penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada KPU Kabupaten Bangka Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti dapat terapkan pada di dunia kerja nanti.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, K., Ikramatoun, S., & Halik. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Desa Rias pada Pemilu 2019. *Jurnal*.
- Perangin-angin, L. L. K., & Zainal, M. (2018). Partisipasi Politik Pemilih pemula dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial. *Jurnal*.
- Sa'ban, L. A., Sadat, A., & Nastia. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018. *Jurnal*.
- sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. alfabeta.
- Wardhan, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal*.
- Widiyaningrum, & Yuspita, W. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik Sebuah Kajian Teori Kajian Teoritis. *Jurnal*.